



## Pengelolaan Sampah dalam Sektor Pariwisata Bali melalui Perspektif Administrasi Publik

Ni Putu Tirka Widanti<sup>1\*</sup>, I Kadek Pageh Artha Widiarta Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia

Email: [diah.utari@unr.ac.id](mailto:diah.utari@unr.ac.id)<sup>1</sup>, [kadekpageh02@gmail.com](mailto:kadekpageh02@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [diah.utari@unr.ac.id](mailto:diah.utari@unr.ac.id)

**Abstract** Tourism is a leading sector in Bali Province that significantly contributes to the regional economy. However, rapid tourism growth has also generated environmental problems, particularly the increasing volume of waste in tourist areas. This study aims to examine waste management in Bali's tourism sector from the perspective of Public Administration. The research method employed is a literature review by analyzing five academic journals related to waste issues and sustainable tourism. The findings indicate that waste problems in Bali are caused not only by high tourist activities but also by weak policy implementation, poor inter-institutional coordination, and low community participation. From a public administration perspective, waste management requires the government's role as policy maker, regulator, and effective public service provider. The application of good governance principles, multi-stakeholder collaboration, and institutional capacity building are essential in achieving sustainable tourism in Bali. This study emphasizes that waste management is a crucial component of tourism governance that must be integrated into regional public policies.

**Keywords:** Public Administration; Public Policy; Tourism Governance; Tourism; Waste Management.

**Abstrak** Pariwisata merupakan sektor unggulan di Provinsi Bali yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun, pesatnya pertumbuhan pariwisata juga menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya peningkatan volume sampah di kawasan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sampah dalam sektor pariwisata di Bali dari perspektif Ilmu Administrasi Publik. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis lima jurnal ilmiah yang relevan dengan isu sampah dan pariwisata berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Bali tidak hanya disebabkan oleh tingginya aktivitas wisatawan, tetapi juga oleh lemahnya implementasi kebijakan publik, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan sampah membutuhkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan penyedia pelayanan publik yang efektif. Penerapan prinsip good governance, kolaborasi multi-stakeholder, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari tata kelola pariwisata yang harus diintegrasikan dalam kebijakan publik daerah.

**Kata kunci:** Administrasi Publik; Kebijakan Publik; Pariwisata; Sampah; Tata Kelola Pariwisata.

### 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, yang berperan besar dalam perekonomian dan mobilitas sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) langsung ke Bali pada Juli 2025 tercatat mencapai 697.107 kunjungan, meningkat dibanding bulan sebelumnya, sedangkan total kunjungan wisman sepanjang Januari–Juli 2025 mencapai sekitar 3,98 juta, menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan pariwisata yang kuat di Bali. Selain itu, jumlah perjalanan wisatawan domestik (wisnus) ke Bali pada Juli 2025 mencapai sekitar 2,29 juta perjalanan, atau meningkat secara signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang

di Bali pada bulan tersebut juga mencatat angka yang relatif tinggi, yaitu  $\pm 67,75$  persen, (BPS Provinsi Bali, 2025).

Aktivitas pariwisata yang intensif ini memberikan tekanan besar terhadap sistem lingkungan dan infrastruktur lokal, termasuk pengelolaan sampah. Tekanan tersebut bukan hanya terkait kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga berkaitan dengan pola konsumsi, karakter sampah yang semakin beragam, dan kapasitas pengelolaan sampah yang harus disediakan oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha dan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang mencakup perumusan kebijakan, penyediaan layanan teknis, pembentukan kelembagaan yang efektif, serta koordinasi lintas aktor. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan teknis, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah, tetapi juga sebagai perumus kebijakan, koordinator lintas sektor, dan fasilitator keterlibatan masyarakat serta pelaku usaha pariwisata dalam rangka mendorong pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian terkait sampah di Bali dan di daerah lain umumnya menitikberatkan pada aspek teknis dan operasional, seperti implementasi TPS3R, pengembangan bank sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta teknologi pengolahan sampah. Meskipun aspek-aspek ini penting untuk meningkatkan kapasitas fisik dan teknis pengelolaan sampah, fokus yang dominan pada hal-hal teknis tersebut seringkali mengabaikan dimensi tata kelola (governance) yang justru fundamental dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Secara khusus, aspek-aspek seperti desain kebijakan pengelolaan sampah yang secara eksplisit terkait dengan tekanan dari sektor pariwisata, pembagian kewenangan antar level pemerintahan, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menghadapi volume sampah yang meningkat akibat pariwisata, serta koordinasi lintas aktor dan akuntabilitas implementasi kebijakan belum banyak dibahas secara mendalam.

Meningkatnya volume kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada jumlah sampah, tetapi juga pada kompleksitas tata kelola penyelenggaraan layanan publik yang harus responsif terhadap dinamika tersebut. Tanpa desain kebijakan yang terintegrasi, kejelasan kewenangan, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta koordinasi yang efektif antar aktor — termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa adat, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat — berbagai upaya teknis pengelolaan sampah memiliki potensi untuk berjalan parsial atau tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana desain kebijakan pengelolaan sampah yang berkaitan dengan sektor pariwisata

dirumuskan, bagaimana pelaksanaannya diimplementasikan dalam koordinasi dan kapasitas kelembagaan yang ada, hambatan tata kelola yang muncul dalam praktik, serta rekomendasi perbaikan tata kelola yang paling relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di destinasi pariwisata Bali yang berkelanjutan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pariwisata dan Permasalahan Sampah**

Pariwisata memiliki hubungan erat dengan isu lingkungan, terutama sampah. Aktivitas wisata menghasilkan sampah plastik, limbah makanan, dan limbah padat lainnya yang jumlahnya meningkat seiring dengan pertumbuhan wisatawan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kawasan wisata pesisir dan perkotaan di Bali menjadi titik kritis permasalahan sampah akibat tingginya aktivitas pariwisata.

### **Administrasi Publik dan Kebijakan Publik**

Ilmu Administrasi Publik mempelajari bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan (policy maker), pelaksana kebijakan (policy implementer), dan penyedia pelayanan publik. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya perencanaan, koordinasi antar lembaga, serta evaluasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

### **Good Governance dan Partisipasi Masyarakat**

Good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah dalam sektor pariwisata membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis lima jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pengelolaan sampah dan pariwisata di Bali. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji keterkaitan antara pengelolaan sampah, pariwisata, dan administrasi publik.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya jumlah wisatawan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta lemahnya implementasi kebijakan publik. Dari perspektif administrasi publik, permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Beberapa kebijakan pengelolaan sampah telah diterapkan oleh pemerintah daerah Bali, seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan pengembangan program bank sampah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan.

Penerapan prinsip good governance menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

##### **Tekanan Pariwisata dan Timbulan Sampah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pariwisata di Bali mengalami tekanan tinggi akibat peningkatan kunjungan wisatawan, yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan timbulan sampah. Fenomena timbulan sampah ini telah diidentifikasi oleh peneliti lain sebagai bagian dari realitas pariwisata di Bali, di mana kedatangan wisatawan yang besar menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih responsif dan adaptif (Sutrisnawati & Purwahita, 2025).

##### **Desain Kebijakan Pengelolaan Sampah Pariwisata**

Kebijakan pengelolaan sampah di Bali sudah ada dalam bentuk aturan teknis, tetapi kurang spesifik mengatur hubungan antara kebijakan lingkungan dan pariwisata. Studi terdahulu juga mencatat bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Bali masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci aspek pengelolaan di kawasan wisata yang memiliki dinamika berbeda dari area lain (Wira Utama, 2023). Hal ini menunjukkan kesenjangan dalam desain kebijakan yang perlu diisi agar instrumen kebijakan lebih kontekstual terhadap tekanan pariwisata.

##### **Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar Aktor**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pariwisata masih menghadapi tantangan koordinasi antar instansi dan aktor. Temuan ini sejalan dengan temuan Shantika et al. (2025), yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kebijakan seperti larangan plastik sekali pakai,

*enforcement* yang lemah dan infrastruktur yang terbatas menghambat efektivitas implementasi di kawasan wisata.

### **Hambatan Tata Kelola dalam Pengelolaan Sampah Pariwisata**

Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya mekanisme koordinasi formal antar pemangku kepentingan, serta minimnya akuntabilitas dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa peran komunitas dan kerja sama lintas sektor sangat penting, namun belum memadai dalam praktik di Bali (Shantika & Wijaya, 2024; Kalpikawati & Pinaria, 2023).

### **Implikasi untuk Tata Kelola yang Lebih Baik**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif pariwisata dan pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendorong kepatuhan serta kolaborasi antar aktor.

## **5. KESIMPULAN**

Pengelolaan sampah dalam sektor pariwisata di Bali merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata dan kualitas pelayanan publik. Dari perspektif Ilmu Administrasi Publik, pengelolaan sampah membutuhkan kebijakan publik yang efektif, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Penerapan prinsip good governance dan kolaborasi multi-stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam tata kelola pariwisata daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, N. N. S., *et al.* (2024). The future of green tourism in Bali: Challenges and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism Studies*, 7(2), 178–195. <https://doi.org/10.31940/jasth.v7i2.178-195>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Perkembangan pariwisata Provinsi Bali Juli 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Kalpikawati, I. A., & Pinaria, N. W. C. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah berbasis sumber mendukung desa wisata berkelanjutan (studi kasus Desa Wisata Taro, Bali). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(1), 50–68. <https://doi.org/10.30647/jip.v28i1.1676>

- Mihalic, T. (2020). Sustainable-responsible tourism discourse. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119–130.
- Purwahita, A. A. A., & Sutrisnawati, N. K. (2018). Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Journal of Integrated Hospitality Management*, 1(2), 45–55. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i1.143>
- Shantika, B., & Wijaya, I. N. C. (2024a). Towards sustainable tourism destination: Addressing waste management solutions in Bali. *Journal of Bali Tourism and Management*, 5(1), 12–25.
- Shantika, B., & Wijaya, I. N. C. (2024b). Towards sustainable tourism destination: Addressing waste management solutions in Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 5(3), 284–296. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v5i2.355>
- Shantika, B., Yanti, N. K. W., & Septiadji, R. R. (2025). The impact of tourism pollution and entrepreneurs' role in finding sustainable waste management solutions in Kuta, Seminyak, and Ubud. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 7(2), 127–143. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v7i2.127-143>
- Sutrisnawati, N. K., & Purwahita, A. A. A. (2025). Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*.
- Tamaratika, F., *et al.* (2021). Urban heritage tourism development strategies based on visitor satisfaction. *E-Journal of Tourism*, 8(2), 134–145.
- Widyastuty, A. A. S. A. (2025). Urban heritage tourism kawasan Denpasar Bali. *Jurnal Pariwisata dan Administrasi Publik*, 3(1), 20–30.
- Wira Utama, I. P. (2023). Policy paper kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali: Problematika dan solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 175–182. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.121>